

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntansi yang memadai dapat menghindarkan instansi pemerintah dari keinginan-keinginan pihak tertentu yang ingin melakukan penyelewengan, penipuan, penggelapan, serta pemborosan harta kekayaan rakyat. Dengan adanya sistem akuntansi yang efektif dan efisien, diharapkan akan meminimalkan kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem informasi keuangan menjadi semakin penting dalam kehidupan perekonomian, khususnya untuk dunia usaha. Hal ini terjadi karena para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan semakin bijaksana serta ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah termasuk memungut pajak dan retribusi daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menggunakan aktiva instansi agar kegiatan operasional instansi dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan instansi dapat tercapai.

Di dalam mewujudkan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tersebut maka diperlukan suatu sistem yang baik. Dimana sistem yang diharapkan dalam hal ini adalah sistem akuntansi aktiva tetap yang mana

kita ketahui bahwa sangat pentingnya peranan aktiva tetap yang digunakan untuk pelaksanaan operasional instansi dalam rangka pencapaian tujuan dan kegiatan normal instansi yang pada umumnya lebih dari 1 tahun. Ditinjau dari segi fungsinya, dari segi jumlah dana yang diinvestasikan, dari segi pengolahannya dan dari segi pengawasannya aktiva tetap pasti melibatkan banyak orang dalam penggunaan dan dalam melakukan operasional instansi guna menunjang tujuan daripada pemerintah khususnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Aktiva tetap haruslah diolah secara efektif dan efisien dan ekonomis agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Halim (2008) **“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”**¹

Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, klasifikasi aset tetap dapat dibagi menjadi enam kelompok, salah satunya adalah peralatan dan mesin. Akuntansi aset tetap, peralatan dan mesin meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan darat, angkutan air, angkutan udara, bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan rumah tangga, alat-alat seperti studio, komunikasi, ukur, kedokteran, laboratorium, dan persenjataan/keamanan.

Aktiva tetap peralatan dan mesin dalam operasi di pemerintah selalu mengeluarkan biaya-biaya, selanjutnya biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan

¹ Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 110

apakah memenuhi syarat untuk dikapitalisasi atau dibebankan sebagai biaya, hal itu tergantung pada masa manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Dari segi akuntansi, ditegaskan bahwa selama masa penggunaan aktiva tetap dilakukan penyusutan untuk mengalokasikan harga perolehan secara sistematis dan rasional. Selain itu aktiva tetap juga memerlukan biaya-biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya untuk memperbaiki kerusakan aktiva tetap. Pengeluaran-pengeluaran seperti itu harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk dibebankan sebagai biaya dan dikapitalisasi pada harga perolehan.

Aktiva tetap merupakan salah satu komponen yang penting bagi pemerintah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Selain itu, aktiva tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca yang harus dipertanggungjawabkan kewajarannya. Sehingga, ketelitian dalam melakukan pengelolaan, pengakuan, penilaian, dan pelepasan berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan daerah. Banyaknya aktiva tetap yang dimiliki oleh pemerintah menjadi kendala tersendiri dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Bagi instansi pemerintah, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aktiva tetap bukanlah hal yang mudah, karena pemerintah dikenal sebagai pelaku ekonomi yang besar. Permasalahan lain timbul ketika penilaian dari aktiva tetap tidak sesuai dengan aturan Pemerintah yang berlaku, hal tersebut menyebabkan penilaian tidak wajar ketika disajikan dalam laporan keuangan. Keandalan penilaian sebuah aktiva tetap dalam suatu entitas atau institusi pemerintahan dapat dipertanyakan ketika tingkat kesesuaian penyajian nilainya terhadap peraturan

Pemerintah atau Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku rendah atau sama sekali tidak sesuai.

Permasalahan lain yang juga sering terjadi dalam aset tetap seperti, pengamanan atas aset yang kurang memadai, Selain itu nilai aset tetap pemerintah yang dicantumkan dalam neraca sulit untuk diyakini kewajarannya termasuk dalam penilaian penyusutan aset tetap tersebut. Sering kali, aset tetap yang sudah habis masa ekonomisnya tidak memiliki nilai yang jelas dan tidak dicantumkan nilainya secara transparan di dalam Neraca. Permasalahan tersebut menjadi salah satu faktornya dikarenakan lemahnya sistem pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam menangani aset, sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai aset tetap dalam neraca.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa adalah penting untuk memiliki suatu sistem akuntansi dalam suatu pemerintahan, terutama pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Maka tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya kalau suatu badan pemerintahan tidak memiliki suatu sistem akuntansi yang memadai. Badan pemerintah tersebut mungkin tidak dapat memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya yang perlu dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang menyangkut aktivitas dan kegiatan sehari-hari dalam Badan pemerintah tersebut. Peneliti melihat bahwa sistem akuntansi aktiva tetap penting bagi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mendorong peneliti untuk mengetahui bagaimana Sistem Akuntansi Aktiva Tetap dalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, sehingga peneliti

tertarik untuk mengambil judul **“SISTEM AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka adapun rumusan masalah yang penulis uraikan adalah: **Bagaimana Sistem Akuntansi Aktiva Tetap pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?**

1.3. Batasan Masalah

Sistem akuntansi aktiva tetap yang dibahas dalam penelitian ini yaitu aset yang dimiliki oleh pemerintah dengan kelompok aset di pemerintah yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Namun di antara keenam kelompok aset pemerintah tersebut, aktiva yang diteliti hanya aset peralatan dan mesin yang berkaitan dengan sistem akuntansinya dari pembukuan, inventarisasi hingga pelaporan peralatan dan mesin tahun 2017 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, sehingga terkait dengan dokumen-dokumen, fungsi-fungsi yang terkait dan prosedur yang digunakan dalam sistem akuntansi aktiva bagian peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansinya peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sehingga memahami bagaimana dokumen, fungsi yang terkait, dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam sistem akuntansi aktiva tetap.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan sistem akuntansi aktiva tetap pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Bagi BP2RD

Digunakan sebagai masukan yang bermanfaat dalam membuat perbaikan kebijakan atau keputusan pengawasan sistem akuntansi aktiva tetap pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Sistem Akuntansi Aktiva Tetap

Akuntansi yang dikenal saat ini pada mulanya hanya berguna untuk Mencatat harta benda seseorang, kemudian menjadi alat pertanggungjawaban seseorang mengurus harta benda orang lain, juga sebagai alat pengawasan serta perlindungan harta. Seiring dengan perkembangan zaman, Akuntansi juga digunakan sebagai sistem informasi ekonomi dan keuangan yang mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya agar informasi dapat dikelola secara baik, diperlukan mekanisme atau kegiatan yang baik pula. Sistem pengolahan data ini akan melibatkan manusia sebagai penggerak dan alat sebagai penunjang pencapaian tujuan. Berbicara mengenai sistem akuntansi aktiva tetap, ada baiknya dirincikan lebih dahulu pengertian dari sistem, akuntansi dan, aktiva tetap itu sendiri.

2.1.1. Pengertian Sistem

Menurut Puspitawati dan Anggadini (2011) **“Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari suatu prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.”**² Dengan kata lain sesuatu dapat

² Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal. 1

dikatakan sebagai sistem, apabila memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan.

Hasil dari sistem adalah informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Data adalah representasi objek. Agar dapat menggambarkan objek yang diwakilinya, data harus dipilih yang paling sesuai agar informasi yang dihasilkan dapat diandalkan.

Menurut Munthe (2016) **“Informasi adalah salah satu sumber daya bisnis, di mana setiap hari dalam bisnis arus informasi dalam jumlah yang sangat besar mengalir ke pengambil keputusan dan pemakai lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan internal ke pemakai eksternal seperti customer, supplier, dan para stakeholders yang tentu saja memiliki kepentingan terhadap perusahaan”**.³ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, informasi yang diolah dengan baik dapat berguna dan dapat dipakai oleh pengambil keputusan yang dapat menguntungkan perusahaan.

Menurut Puspawati dan Anggadini (2011) untuk membedakan dan mengenal antara suatu sistem dengan sistem lainnya dapat dilakukan dengan pendekatan karakteristiknya yang melekat pada suatu sistem tersebut, yakni:

- 1. Tujuan Sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar target tersebut bisa dicapai maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya.**
- 2. Batas Sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya.**
- 3. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem, bisa fisik atau abstrak.**

³ Mei M. H. Munthe, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Pertama, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal. 4

4. **Hubungan atau Herarki Sistem** merupakan hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan subsistem yang lebih besar.
5. **Input Proses Output** merupakan segala sesuatu yang masuk kedalam sistem dan diproses menjadi keluaran.
6. **Lingkungan Sistem** merupakan faktor-faktor diluar sistem yang mempengaruhi sistem.⁴

Sehingga untuk memenuhi informasi yang berkualitas, terdapat beberapa karakteristik yang harus dimiliki. Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011), Informasi yang berguna memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Akurat**
2. **Tepat Waktu**
3. **Relevan**
4. **Lengkap**⁵

Dengan demikian informasi dapat dikatakan berguna, apabila informasi tersebut telah sesuai dengan karakteristik diatas. Akurat dapat diartikan bahwa informasi itu dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya. Tepat waktu dapat diartikan bahwa informasi harus tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan dan tidak boleh terlambat. Relevan dapat diartikan bahwa informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan dan informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Lengkap dapat diartikan bahwa informasi yang diberikan harus lengkap secara keseluruhan dan tidak ada hal-hal yang dikurangi dalam menyampaikan informasi tersebut.

2.1.2. Pengertian Akuntansi

Menurut Manurung dan Sihombing (2018) **“Akuntansi adalah sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan**

⁴ Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, *Op.Cit.*, hal. 2

⁵ *Ibid*, hal. 13

penganalisisan data keuangan suatu organisasi.”⁶ Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan.

Menurut Pura (2013) **“Akuntansi adalah Seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.”**⁷ Sebagai suatu disiplin pengetahuan, akuntansi sebenarnya bukan merupakan pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi lebih merupakan gabungan dari berbagai disiplin pengetahuan lainnya.

2.1.3. Pengertian Aktiva Tetap

Menurut Mulyadi (2016) **“Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali.”**⁸ Definisi ini mengartikan bahwa aset tetap yang dimiliki pemerintah dipergunakan secara langsung dalam kegiatan normal pemerintahan, aset tetap juga dapat dipergunakan secara berulang-ulang dalam jangka waktu

⁶ Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta Dan Pemerintah Daerah)**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal. 2

⁷ Rahman Pura, **Pengantar Akuntansi 1**, Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 4

⁸ Mulyadi, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 497

lebih dari satu periode akuntansi sesuai dengan masa manfaatnya dan nilainya yang relative material bagi pemerintah.

Menurut Meliala, dkk (2007) **“Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”**⁹ Termasuk dalam aset tetap pemerintah ini adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (misalkan instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor) dan hak atas tanah. Sedangkan yang tidak termasuk aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2.1.4. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016) **“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”**¹⁰ Dari definisi sistem tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan.

Rahman Pura (2013) **“Sistem Akuntansi adalah bidang yang membahas perancangan, pencatatan, dan pengolahan data agar laporan keuangan**

⁹ Tulis S. Meliala, dkk, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua, Semesta Media, Jakarta, 2007, hal. 111

¹⁰ Mulyadi, **Op.Cit.**, hal. 3

dapat disusun serta disajikan dengan cepat, akurat, dan efisien.”¹¹ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah alat-alat yang digunakan untuk mengelolah data dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan.

Menurut Reeve, dkk (2009) **“Sistem Akuntansi (*accounting system*) adalah Metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan.”¹²** Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi aktiva tetap adalah sistem akuntansi yang mengolah transaksi yang mengubah aktiva tetap yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Aset daerah meliputi sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

¹¹ Rahman Pura, **Op.Cit.**, hal. 7

¹² James M. Reeve, dkk, **Pengantar Akuntansi (Adaptasi Indonesia)**, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 223

2.1.5. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Menurut Sari, dkk (2015) **“SAI merupakan sistem akuntansi yang diterapkan oleh satker sebagai bentuk pertanggungjawaban satker atas anggaran dan aset negara yang dikuasainya.”**¹³ Selain itu, SAI dapat disimpulkan juga sebagai serangkaian prosedur maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara./Lembaga.

Oleh karena itu SAI dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) untuk pertanggungjawaban aset negara dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan dalam bagan SAPP.

SAI dilaksanakan oleh kementerian Negara/lembaga. Kementerian Negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam pelaksanaan SAI, kementerian Negara/lembaga membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

Menurut Sari, dkk Unit akuntansi barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)**
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPA-E1)**
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W)**

¹³ Eka Nurmala Sari, dkk, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Cetakan Pertama: Perdana Publishing, Medan, 2015, hal. 215

d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).¹⁴

Menurut Sari, dkk (2015), Aplikasi – aplikasi yang terkait dengan pelaksanaan SAI:

- 1. Aplikasi SPM, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengajukan pembayaran kepada KPPN sebagai bentuk pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan DIPA atau Surat Keputusan Otorisasi (SKO) lainnya. *Output* aplikasi ini adalah SPM yang diajukan kepada KPPN.**
- 2. Aplikasi SAI, merupakan aplikasi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan (SAT) satker.**
- 3. Aplikasi SABMN, merupakan aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan asset yang dikuasai satker dalam rangka pelaksanaan akuntansi aktiva tetap.¹⁵**

2.2. Klasifikasi Sistem Akuntansi Aktiva Tetap

Menurut Erlina, dkk (2015) aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Tanah**
- 2. Perlatan dan Mesin**
- 3. Gedung dan Bangunan**
- 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
- 5. Aset Tetap Lainnya**
- 6. Konstruksi dalam Pengerjaan.¹⁶**

¹⁴ **Ibid**, hal. 216

¹⁵ **Loc. Cit**

¹⁶ Erlina, dkk, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual**, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2015, hal. 245

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk maksud dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup Jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai yang tercatat.

2.3. Pengakuan Aset

Menurut Halim (2008) aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. **Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan.**
2. **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.**
3. **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.**
4. **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**¹⁷

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

¹⁷ Abdul Halim, **Op. Cit.**, hal. 112

2.4. Pengukuran

Menurut Halim (2008), **“Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.”**¹⁸

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

¹⁸ **Ibid**, hal. 113

2.5. Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Halim (2008) Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengungkapan (*disclosure*) untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);**
- 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:**
 - a. Penambahan;**
 - b. Pelepasan;**
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;**
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.**
- 3. Informasi penyusutan, meliputi:**
 - a. Nilai penyusutan;**
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;**
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;**
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;¹⁹**

2.6. Pengelolaan Aset Tetap

Menurut Yusuf (2010), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

¹⁹ *Ibid*, hal. 115

1. **Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran**
2. **Pengadaan**
3. **Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran**
4. **Pemeliharaan**
5. **Penatausahaan**
6. **Penggunaan**
7. **Pemanfaatan**
8. **Pengamanan**
9. **Penilaian**
10. **Penghapusan**
11. **Pemindahtanganan**
12. **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**
13. **Pembiayaan**
14. **Tuntutan Ganti Rugi.**²⁰

Pelaksanaan Siklus pengelolaan aset/barang milik daerah dilaksanakan oleh pejabat tersebut diatas sesuai wewenang yang diberikan melalui tugas pokok dan fungsi yang diformalkan dalam peraturan daerah dan peraturan gubernur/bupati/walikota. Pelaksanaan siklus pengelolaan asetbarang milik daerah tersebut hanya dipahami oleh semua pejabat dan para pelaksana serta harus diformalkan dalam suatu sistem dan prosedur agar masing-masing siklus dilaksanakan sesuai mekanismenya.

Siklus yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan mempunyai tanggungjawab masing-masing dan memiliki prosedur pelaksanaan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah proses penerimaan, penyimpanan, serta penyaluran, semua proses itu bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang

²⁰ M. Yusuf, **Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik**, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 31

menangani administrasi aset/barang milik daerah, melainkan juga perlu melibatkan para pimpinan pelaksana kegiatan.

Tahapan lainnya dalam siklus pengelolaan aset daerah adalah pemeliharaan, setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah. Siklus lainnya adalah penatausahaan, pelaksanaannya dilakukan oleh bendahara barang dan petugas pencatat atau pejabat yang ditunjuk mengelola aset/barang milik daerah.

Selanjutnya, adalah siklus penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, ketiga siklus itu dilakukan dalam rangka memperjelas status aset daerah. Siklus penilaian dilakukan ketika aset akan dihapus untuk dijual atau dilakukan tukar-menukar atau untuk dilakukan kerjasama pemanfaatan. Siklus pengendalian, pengawasan, serta pembiayaan dan tuntutan ganti rugi, siklus ini diperlukan agar tidak mudah dimanipulasi pengguna aset karena aset daerah banyak ragam dan kepentingannya yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola aset/barang milik daerah dan aparat pengawasan, sedangkan siklus pembiayaan diperlukan untuk membiayai aset/barang milik daerah dalam rangka pembelian atau pemeliharaan, yang terakhir adalah siklus tuntutan ganti rugi yaitu setiap aset yang hilang baik yang dilakukan bendahara maupun oleh pejabat atau pegawai berdasarkan kelalaiannya harus dilakukan tuntutan ganti rugi aset/barang milik daerah agar aset tetap terjaga dengan baik.

2.7. Dokumen yang Digunakan

Menurut Erlina, dkk (2015) Dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset dan menjadi dasar dalam pencatatan aset yaitu:

- a. **Laporan Barang Milik Daerah atau Laporan Hasil Inventarisasi untuk perekaman saldo awal.**
- b. **Berita Acara Serah Terima.**
- c. **Bukti Kepemilikan.**
- d. **Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).**
- e. **Faktur Pembelian.**
- f. **Kuitansi.**
- g. **Kartu Inventaris Ruangan (KIR).**
- h. **Kartu Inventaris Barang (KIB).**
- i. **Daftar Barang Milik Daerah.**
- j. **Buku Persediaan.**
- k. **Laporan Aset Semesteran.**
- l. **Laporan Aset Tahunan.**
- m. **Dokumen lain yang sah.**²¹

Pada saat terjadinya pembelian aset tetap maka SKPD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SPM dan SP2D atas belanja modal dapat melakukan penjurnalan sementara atas pembelian aset terkait sebesar nilai yang tercantum pada SPM. Jurnal pengakuan definitif atas aset tersebut akan dilakukan setelah menerima data atas pencatatan aset dari Bendahara Barang/Kuasa Pengguna Barang sebesar nilai yang dicatat oleh Bendahara Barang/Kuasa Pengguna.

2.8. Fungsi-fungsi yang terkait

Menurut Erlina, dkk (2015) fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi perolehan aktiva tetap yaitu:

²¹ Erlina, dkk, **Op. Cit.**, hal 253

- a. **Bendahara Barang.**
- b. **Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.**
- c. **Bendahara Pengeluaran.**
- d. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.**
- e. **Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran.**
- f. **Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.**
- g. **Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.**²²

2.9. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Menurut Sihite (2017) “**Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan**”²³ dilaksanakan oleh PPK-SKPD:

1. Kuasa Bendahra Umum Daerah (BUD) menerbitkan dan menyampaikan SP2D-LS ke PPK-SLPD, dan fungsi akuntansi di SKPD.
2. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP, LPJ-TU, dan SPJ Administratif ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
3. Penyimpan barang menyampaikan laporan atau berita acara penerimaan barang PPK-SKPD.
4. Pengguna barang menyampaikan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak digunakan lagi, LBPS; dan LBPT ke PPK-SKPD.
5. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SP2D-LS; LPJ-TU dan usulan penghapusan barang milik daerah serta melakukan rekonsiliasi antara catatan aset yang ada padanya dengan LBPS dan LPBT ke pengelola barang.

²² **Ibid**, hal. 252.

²³ Lenny Rani Sihite, **Sistem Akuntansi Aktiva Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan**, Skripsi Ekonomi, UHN, Medan, 2017, hal. 21

6. PPK-SKPD membuat bukti memorial terkait dengan perolehan aset tetap, penghapusannya dan/atau kesalahan pencatatan aset tetap yang dilakukannya, berdasarkan bukti-bukti yang ada.
7. PPK-SKPD membukukan bukti memorial terkait dengan transaksi perolehan aset tetap, penghapusan atau koreksi kesalahan pencatatannya ke dalam buku jurnal umum.
8. Secara periodik PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.
9. PPK-SKPD menyusun neraca saldo pada akhir periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (minimal 1 tahun sekali, yaitu di setiap akhir tahun anggaran).
10. Fungsi akuntansi di SKPD sebagai konsolidator tidak membukukan jurnal korolari terkait dengan penambahan dan/atau pengurangan aset tetap yang terjadi di SKPD.

Berdasarkan prosedur diatas dapat digambarkan bagan alir sistem akuntansi tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlihat pada gambar 2.1

Berdasarkan bagan alir di atas adapun yang menjadi penjelasannya dalam mengelola aset daerah di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan dan menyampaikan SP2D-LS ke PPK-SKPD.
2. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ-UP dan LPJ-TU ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
3. Penyimpan barang menyampaikan laporan atau berita acara penerimaan barang ke PPK-SKPD.
4. Pengurus barang menyampaikan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak digunakan lagi; LBPS; dan LBPT.
5. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SP2D-LS; LP-UP; LPJ-TU dan usulan penghapusan BMD, serta melakukan rekonsiliasi antara catatan aset tetap yang ada padanya di LBPS dan LBPT.
6. PPK-SKPD membukukan buku memorial ke dalam buku jurnal umum.
7. Secara periodik, PPK memposting jurnal ke buku besar.
8. PPK-SKPD membuat neraca saldo dan laporan keuangan pada akhir periode tertentu.

2.10. Jaringan Subsistem

Menurut Mulyadi (2016), Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aktiva tetap adalah:

- 1. Sistem pembelian aktiva tetap**
- 2. Sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri**
- 3. Sistem pengeluaran modal**
- 4. Sistem penghentian pemakaian aktiva tetap**
- 5. Sistem transfer aktiva tetap**
- 6. Sistem revaluasi aktiva tetap**
- 7. Sistem akuntansi depresiasi aktiva tetap.²⁴**

Sistem pembelian aktiva tetap, dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aktiva tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian.

Sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri, dirancang untuk mencatat harga pokok aktiva tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan.

Sistem pengeluaran modal, dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aktiva tetap dengan adanya pengeluaran modal.

Sistem penghentian pemakaian aktiva tetap, dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aktiva tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aktiva tetap tersebut.

Sistem transfer aktiva tetap, dirancang untuk mencatat transfer aktiva tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain.

Sistem revaluasi aktiva tetap, dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aktiva tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial.

²⁴ Mulyadi, **Op.Cit.**, hal. 514

Sistem akuntansi depresiasi aktiva tetap, dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aktiva tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial.

2.11. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Sihite (2017) **“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”**²⁵ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dari SPIP adalah terciptanya suatu sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik *good governance* dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memahami terlebih dahulu konsep dasar SPIP ini.

Menurut Sihite (2017) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki lima unsur yaitu:

- 1. Lingkungan Pengendalian**
- 2. Penilaian Resiko**
- 3. Kegiatan Pengendalian**
- 4. Informasi dan Komunikasi**
- 5. Pemantauan**²⁶

Lingkungan Pengendalian yang dilakukan dengan cara: pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

²⁵ Lenny Rani Sihite, **Op. Cit.**, hal. 26

²⁶ **Ibid**, hal. 27

- a. Penegakkan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penilaian resiko yaitu dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan/memperkirakan resiko apa yang akan ditimbulkan nantinya.

Penilaian resiko terdiri dari:

- a. Identifikasi resiko
- b. Analisa resiko

Dalam rangka penilaian resiko pimpinan instansi pemerintahan menetapkan:

- a. Tujuan Instansi Pemerintah
- b. Tujuan pada peningkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Pengendalian yaitu dilakukan dengan cara: pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang

bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko.
- c. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik dan aset.
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- j. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi yaitu dilakukan dengan cara: pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. Serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Aktiva Tetap pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan yang dilakukan mengenai dokumen yang digunakan, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan prosedur sistem akuntansi aktiva tetap pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Suliyanto (2009) mengatakan: **“Metodologi Kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau judgement sehingga tidak berupa angka, melainkan berupa kata atau kalimat.”**²⁷ Peneliti kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku

²⁷ Suliyanto, **Metode Riset Bisnis**, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hal. 134

yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari suatu pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan lalu di interpretasikan berdasarkan teori yang ada.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Menurut Purba (2011): **“Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber pertama.”**²⁸ Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung di lapangan. Salah satu ciri khas data primer ialah data tersebut dikumpulkan sendiri (atau dengan bantuan asisten) dan digunakan sendiri oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dialog, dan wawancara yang dilakukan langsung kepada Kepala Sub Bagian (Kasubbid) atau bagian akuntansi yang terkait dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem akuntansi aktiva tetap pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

²⁸ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Cetakan Pertama: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 106

2. Data Sekunder

Menurut Purba (2011) **“Data Sekunder adalah data yang telah ada atau data telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain yang siap digunakan oleh orang ketiga.”**²⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa sejarah ringkas BP2RD, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, dokumen yang digunakan, fungsi-fungsi yang terkait atas prosedur aktiva tersebut.

3.4. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Penelitian Kepustakaan**
2. **Penelitian Lapangan**³⁰

Penelitian kepustakaan, metode ini digunakan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang ada serta bahan-bahan lain serta seperti materi perkuliahan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

²⁹ **Ibid**, hal.107

³⁰ Lenny Rani Sihite, **Op. Cit.**, hal. 32

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah:

1. Wawancara

2. Dokumentasi³¹

Dalam hal wawancara, metode ini digunakan peneliti untuk mengajukan pertanyaan kepada kepala sub bagian akuntansi (Kasubbid) untuk memberikan keterangan sehubungan dengan bagaimana pengelolaan Peralatan dan Mesin yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dalam hal Dokumentasi, metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, dokumen yang dibutuhkan adalah Neraca tahun 2017.

3.5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2009) “**Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh.**”³² Baik data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

³¹ **Ibid**, hal. 33

³² Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 244

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan status atau fenomena. Sumber penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi informasi untuk memberikan gambaran mengenai sistem akuntansi aktiva tetap. Dalam teknik analisis data ini akan membandingkan antara teori dengan fakta prosedur secara deskriptif dari sistem akuntansi pembelian aktiva tetap pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.